

Peran Negara Hukum dan Lembaga Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Bagi Perempuan dan Anak

April Liana¹, David Miseri Cordias², Zulkarnain³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: Aprillianaaliya51@gmail.com¹, davidmiseri285@gmail.com², Nainzulkar869@gmail.com³

Abstract:

The state law and its application in cases of sexual abuse against women and children are covered in this publication. The aim of this research is to determine the methods used to prevent and combat sexual violence as well as the way in which the supremacy legal system is implemented in these situations. A review of the relevant literature and data analysis from a variety of sources are the methods of analysis employed. The findings demonstrate that the rule of law, through legislation, rules, and efficient execution of the law, has a significant benefit in application of the law to situations of sexual violence. Public awareness and education are also crucial components in the fight against sexual harassment. The research's implications include the necessity of cooperation between the community, law enforcement, and the legal system in order to avoid and uphold the law against sexual harassment cases and ensure that everyone lives in a safe and equitable environment

Abstract

Jurnal ini membahas tentang hukum negara dan penegakannya terhadap kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara penerapan sistem hukum supremasi dalam kasus kekerasan seksual dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Metode analisis yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum memiliki keunggulan penting dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual melalui peraturan perundang-undangan, peraturan, dan penerapan hukum yang efektif. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah pelecehan seksual. Implikasi dari penelitian ini antara lain perlunya kolaborasi antara sistem hukum, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 3 June, 2024

Keywords :

State of Law, Law Enforcement, Sexual Harassment, Women, Children

Keywords:

Negara Hukum; Penegakan Hukum; Pelecehan Seksual; Perempuan; Anak-anak



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446447>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka kejadian pelecehan seksual menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif adalah elemen fundamental untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum memerlukan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kelemahan dalam sistem hukum yang ada, yang mengakibatkan rendahnya tingkat perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Penegakan hukum yang lemah, proses peradilan yang tidak sensitif gender, serta kurangnya dukungan bagi korban merupakan beberapa faktor yang memperburuk situasi. Selain itu, stigma sosial dan budaya patriarki juga turut berkontribusi pada kurangnya pelaporan kasus pelecehan seksual dan lambannya proses hukum. Dalam banyak kasus, korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran supremasi hukum dalam konteks penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual, dengan fokus pada perempuan dan anak yang paling rentan. Melalui analisis hukum dan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada dalam sistem hukum saat ini dan mengusulkan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih efektif dan responsif.

Dengan demikian, jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana penulis mengumpulkan data melalui kuisioner untuk mendapatkan berbagai perspektif orang-orang yang sekiranya mengetahui tentang sudut pandang negara hukum dan penegakan hukum, lalu dikembangkan sebagian analisa menjadi sebuah Jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pada pasal 1 ayat (3) bahwa “negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum” yang berlaku bagi seluruh warga negara dan seluruh penyelenggara negara, artinya harus menaati hukum. Konsep negara hukum di dunia meliputi konsep negara hukum dan konsep negara hukum. Negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan negara hukum di Indonesia merupakan gabungan antara konsep negara dan aturan hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukum harus ditegakkan. Berbagai aturan hukum diciptakan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut sering terjadi, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk undang-undang sendiri. Kita bisa melihat betapa banyak aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) yang terlibat dalam praktik korupsi seperti penyuapan, jual beli perkara, jual beli perkara, dan aktivitas kriminal. Begitu pula dengan beberapa anggota DPR yang pernah terlibat kasus korupsi atau melakukan pelanggaran hukum.

Rule of law merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hukum dan penerapannya dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum di negeri ini memiliki status yang lebih tinggi daripada individu dan hukum mengatur segala tindakan. didasarkan pada konstitusi memuat asas-asas dan hak-hak dasar yang mengatur negara. Konstitusi ini menjadi standar bagi seluruh warga negara dan penguasa untuk menegakkan supremasi hukum untuk mencegah penyerahan guna kekuasaan. undang-undang ini meletakkan dasar bagi pembentukan berbagai cabang pemerintahan dan memperkenalkan sistem checks and balance.

Pada kasus ini ada banyak sekali kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Ini akan menjadi tantangan untuk lembaga-lembaga Indonesia maupun penegak hukum untuk melakukan tindakan mengurangi serta mewujudkan pemenuhan hak-hak bagi kaum wanita dan anak-anak. Para lembaga penegakan hukum harus bisa memberikan perlindungan dari banyak bahaya yang mengintai mereka. Peristiwa kekerasan seksual di Indonesia merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, baik di dalam maupun diluar Lembaga Pendidikan. Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu negara hukum dan penegakan hukum

Negara Hukum

Istilah "negara hukum" berasal dari dua konsep, yaitu "Rechstaat" yang dikemukakan oleh ahli hukum Eropa Kontinental dan "Rule of Law" yang diperkenalkan oleh ahli hukum Anglo-Saxon. Keduanya dapat diartikan sebagai bentuk perumusan hukum yang berdasarkan gagasan konstitusionalisme. Secara sederhana, negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dalam negara yang berdasar hukum, pemerintah dan lembaga lain harus

melaksanakan tindakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum juga berarti bahwa sebuah negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, negara hukum harus sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap hal-hal yang merusak.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang terorganisir dan terstruktur dalam pemerintahan, bertujuan untuk menemukan, menghentikan, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Sistem ini bertujuan untuk mengukuhkan dan menerapkan norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan dapat diartikan sebagai tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, peran lembaga atau aparatur penegak hukum sangat penting dan intensif karena mereka harus siap menghadapi situasi yang rawan dan dapat terjadi di mana saja. Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjalankan perannya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan pelecehan

Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga utama yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Selain itu, mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mengumpulkan bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum. Kepolisian juga dapat berperan sebagai penyidik dan memeriksa tersangka dalam proses penyelidikan. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian ialah:

- a. Penyidik Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan informasi tentang pidana yang telah dialami korban. Pemeriksaan saksi-saksi.
- b. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang relevan dalam proses penyidikan tindak pidana yang terkait dengan apa yang saksi lihat atau dengar sendiri. Jika diperlukan, penyidik dapat meminta pendapat dari ahli yang memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan keterangan yang lebih spesifik.
Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah benar atau tidak. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan untuk mendapatkan bukti yang relevan dalam kasus kekerasan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual
- d. Tujuan dari pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka.
- e. Penyitaan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas. Penyidik harus memiliki surat izin dan tanda pengenal untuk melakukan penyitaan dan memerintahkan tersangka agar segera ditangkap.
- f. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai. Jika proses pemeriksaan selesai, berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk sidang. Namun, jika proses pemeriksaan belum selesai, pengadilan dapat mengembalikan berkas dan tindak pidana akan terus dilanjutkan hingga selesai.

Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa (penuntut umum) memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara, membuat surat dakwaan, dan mengirimkan perkara ke pengadilan. Selain itu, mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Penuntutan: Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut pelaku pelecehan seksual di pengadilan. Mereka mempersiapkan dan menyajikan bukti untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku.

- a. Perlindungan Korban: Kejaksaan juga berperan dalam melindungi korban dan saksi selama proses hukum berlangsung, termasuk melalui program perlindungan saksi dan korban.
- b. Restitusi: Dalam beberapa kasus, kejaksaan dapat menuntut restitusi bagi korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.
- c. Penerapan Hukum: Kejaksaan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten, termasuk dalam kasus pelecehan seksual.
- d. Edukasi Publik: Kejaksaan juga dapat terlibat dalam upaya edukasi publik mengenai dampak pelecehan seksual dan pentingnya melaporkan kejahatan ini.

Kehakiman

Peradilan adalah badan yang diberi wewenang untuk mengadili kasus dan menyelesaikan perselisihan. Sebagai pejabat peradilan negara, hakim mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan peradilan secara adil, jujur, dan tidak memihak. Mereka memutuskan kasus berdasarkan hukum dan keadilan. Peradilan memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum substansif melalui prosedur hukum formal.

- a. Pengadilan: Lembaga peradilan bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus pelecehan seksual dan menentukan hukuman yang pantas bagi para pelakunya berdasarkan hukum yang berlaku.
- b. Perlindungan Hukum: Peradilan memastikan bahwa korban menerima perlindungan hukum yang memadai dan hak-hak mereka dihormati dalam proses hukum.
- c. Pemulihan Korban: Sebagai bagian dari proses pemulihan, otoritas peradilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban.
- d. Efek Jera: Peradilan melalui hukuman yang adil dan jelas menciptakan efek jera bagi pelaku dan berkontribusi terhadap pencegahan kejahatan serupa di masa depan.
- e. Reformasi hukum: Peradilan juga dapat merekomendasikan reformasi hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual.

Advokat

Pengacara adalah seorang profesional yang bertindak sebagai lembaga penegak hukum. Mereka adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan hukum. Status hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh undang-undang dan 10 peraturan hukum. Pengacara mendampingi proses pengadilan, memberikan nasihat hukum, dan mewakili kliennya di pengadilan. Bantuan Hukum. Pengacara memberikan bantuan hukum kepada korban, termasuk penjelasan mengenai proses hukum, hak-hak korban, dan strategi hukum yang dapat digunakan untuk memajukan kasus mereka.

- a. Mengajukan Gugatan: Pengacara bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan dan dokumen hukum yang diperlukan ke pengadilan untuk memulai proses hukum terhadap pelaku.
- b. Negosiasi dan Mediasi: Pengacara dapat berpartisipasi dalam negosiasi atau mediasi untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan yang menguntungkan korban.
- c. Melindungi Privasi Korban: Advokat berupaya melindungi identitas dan privasi korban, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak, untuk menghindari stigma dan trauma lebih lanjut.
- d. Dukungan Psikologis: Pengacara sering kali bekerja sama dengan psikolog dan konselor untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban dan membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami.

SIMPULAN

Sebuah negara hukum berbasis hukum harus memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Penegakan hukum adalah sistem pemerintah yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penghambatan, pemulihan, atau hukuman terhadap pelanggar hukum. Aparatur penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, memiliki peran penting dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan pelecehan dan seksual.

Studi ini menyoroti pentingnya peran negara hukum dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari kasus pelecehan seksual yang meningkat. Dengan penegakan hukum yang efektif, negara dapat

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual dan mencegah tindakan yang merugikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang kuat dan efisien adalah langkah krusial dalam menangani pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman. Kolaborasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam menegakkan hukum adalah kunci dalam menyelesaikan masalah sensitif ini.

REFERENSI

- Sumarsono. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno. 2014. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Edited by Restu Damayanti. Bumi Aksara.
- Burhan,Wirman.2014. *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Natasyaputri,A. (2023,21 February). *Peran Hukum dalam Fenomena Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Indonesia*. Diakses pada 25 Mei 2024, dari <https://www.kompasiana.com/aprilianatasyaputri/63f4ca8708a8b50bef5cb5a2/peran-hukum-dalam-fenomena-pelecehan-seksual-verbal-catcalling-di-indonesia>
- Dewi,Calista. (2024,18 Maret). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Victimologi*. Diakses pada 26 Mei 2024, dari <https://kumparan.com/calistadewik/perlindungan-korban-kekerasan-seksual-dalam-perspektif-victimologi-22NEx5icQtg>
- Inatsan,bestha. (2021,20 April). *PEDOMAN BARU BAGI JAKSA BANTU PEREMPUAN, ANAK DALAM PROSES HUKUM*. Diakses pada 26 Mei 2024, dari <https://magdalene.co/story/pedoman-baru-jaksa-kasus-perempuan-dan-anak/>